

BAB IV

KESIMPULAN

1.1 Kesimpulan

Keberadaan tenaga kerja asing (TKA) di Provinsi Jambi menghadirkan tantangan serius. Meskipun telah diatur melalui PP Nomor 34 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 49 Tahun 2010, implementasi kebijakan ini masih belum optimal. Hal ini ditandai dengan maraknya TKA ilegal, penyalahgunaan visa kerja, dan lemahnya pengawasan. Dampaknya, meliputi ketidaknyamanan di masyarakat, dan potensi ancaman terhadap stabilitas lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Strategi Badan Kesbangpol Provinsi Jambi dalam meningkatkan kewaspadaan dini dan pemantauan TKA di Provinsi Jambi, diukur menggunakan teori strategi Geoff Mulgan dengan lima indikator utama: tujuan, lingkungan, pengarahan, tindakan, dan pembelajaran.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa meskipun program ini sudah dijalankan dengan berbagai upaya, hasilnya masih jauh dari harapan. Program yang seharusnya mengoptimalkan pemantauan TKA dan mencegah potensi pelanggaran, seperti penggunaan visa kunjungan untuk tujuan kerja, masih menghadapi sejumlah kendala signifikan. Secara keseluruhan, strategi Kesbangpol Provinsi Jambi dalam menangani isu TKA menghadapi masalah dalam hal kejelasan data, koordinasi antarinstansi yang lemah, serta keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Hal ini berimbas pada kegagalan dalam mengidentifikasi dan memantau TKA yang bekerja secara ilegal. Meski berbagai upaya dilakukan seperti inspeksi mendadak (Sidak) dan sosialisasi kepada

perusahaan, pelanggaran masih banyak terjadi. Selain itu, visi dan misi yang dimiliki Kesbangpol dalam mengurangi jumlah TKA serta meminimalkan pelanggaran terkait TKA masih dalam tahap perencanaan, seperti pengembangan aplikasi pemantauan yang diperkirakan memerlukan waktu 1-2 tahun. Tindakan yang diambil selama ini, meskipun cukup banyak, belum memberikan dampak nyata terhadap pengurangan pelanggaran dan masalah terkait TKA.

Selanjutnya, upaya pembelajaran yang dilaksanakan oleh Kesbangpol melalui rapat evaluasi masih kurang efektif dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Meskipun refleksi terhadap hambatan dan tantangan dilakukan secara rutin, hasilnya belum sejalan dengan peningkatan yang diharapkan. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan belum sepenuhnya berhasil dan membutuhkan perbaikan yang lebih mendalam.

Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jambi dalam program peningkatan kewaspadaan dini dan pemantauan tenaga kerja asing terbukti tidak optimal diukur berdasarkan lima indikator teori yang sepenuhnya belum tercapai. Ketidakefektifan ini menghambat penyelesaian persoalan TKA secara menyeluruh, menyebabkan lemahnya pengawasan dan tingginya pelanggaran regulasi. Untuk memastikan program berjalan optimal, Kesbangpol harus merumuskan strategi yang lebih konkret, dengan tujuan yang jelas, tindakan terukur, dan koordinasi lintas instansi yang lebih efektif. Reformasi ini diperlukan agar pengelolaan TKA memberikan dampak positif tanpa mengorbankan keamanan, stabilitas sosial, dan peluang kerja lokal.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran yang diajukan peneliti, diantaranya, Kesbangpol perlu memperkuat sistem pemantauan dengan membangun database terintegrasi yang dapat diakses oleh instansi terkait untuk meningkatkan efektivitas penanganan tenaga kerja asing (TKA) di Provinsi Jambi. Selanjutnya, pengembangan aplikasi pemantauan juga harus dipercepat agar pengawasan lebih efisien. Selain itu, koordinasi antarinstansi perlu ditingkatkan melalui forum rutin dan mekanisme kerja sama yang lebih jelas guna memastikan pembagian tugas yang efektif. Peningkatan sumber daya manusia dan anggaran juga menjadi faktor penting, termasuk pelatihan bagi petugas pemantau serta penegakan sanksi yang lebih tegas terhadap perusahaan yang melanggar aturan.

Di sisi lain, Kesbangpol perlu mengoptimalkan program sosialisasi dengan menargetkan perusahaan dan tenaga kerja lokal agar lebih memahami regulasi terkait TKA. Kampanye melalui media sosial, seminar, dan pertemuan langsung dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan. Evaluasi strategi juga harus dilakukan secara berkelanjutan dengan pendekatan berbasis hasil untuk memastikan perbaikan yang lebih terarah. Selain itu, kerja sama dengan akademisi dan pakar ketenagakerjaan dapat membantu menyusun strategi yang lebih efektif berdasarkan penelitian dan praktik terbaik dari daerah lain. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kesbangpol dapat lebih optimal dalam mengatasi permasalahan TKA dan mengurangi pelanggaran yang terjadi.